

KEBIJAKAN EKONOMI BUPATI HEANY RELAWATI RINI WIDYASTUTIK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT TUBAN PADA TAHUN 2006-2011

TANTRI SUKMA APRILINA

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail : Tantrydaring@gmail.com

Artono

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pertumbuhan perekonomian masyarakat kabupaten Tuban mengalami peningkatan pada tahun 2006-2011. Pertumbuhan perekonomian ini terjadi semenjak kepemimpinan bupati Tuban yaitu Heany Relawati Rini Widyastuti. Penelitian dengan judul “ Kebijakan Ekonomi Bupati Heany Relawati Rini Widyastuti Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Tuban tahun 2006-2011” . Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana kebijakan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Tuban, serta bagaimana pengaruh terhadap masyarakat akan kebijakan yang di terapkan selama kepemimpinan bupati Heany Relawati Rini Widyastuti. Dalam penelitian ini, data yang di peroleh langsung dari masyarakat serta penelitian langsung di lembaga-lembaga pemerintah. Adapun data-data yang di peroleh adalah data primer dan data sekunder. Data-data yang di peroleh langsung dari badan kearsipan, serta BAPPEDA kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa dalam menjalankan kepemimpinan, harus memiliki sistem pemerintah yang baik atau biasa di sebut dengan *Good Governance* . Dalam peningkatan perekonomian kabupaten Tuban di pengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan yang di terapkan dalam setiap bidang memiliki kebijakan dan pembangunan yang berbeda-beda. Dalam pengembaganya pemerintah daerah selalu melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam terwujudnya kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan perekonomian masyarakat kabupaten Tuban dapat di lihat langsung dalam angka Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan perekonomian masyarakat Tuban setiap selalu mengalami kenaikan yang baik.

Kata Kunci : Tuban, Kebijakan, Ekonomi

Abstract

The economic growth of people in Tuban district has increased in 2006-2011. This economic growth occurred since the leadership of Tuban bupati, Heany Relawati Rini Widyastuti. The research entitled "The Economic Policy of the Regent Heany Relawati Rini Widyastuti In Improving the People's Economy of Tuban Regency in 2006-2011". In this research has a formulation of the problem of how economic policy to improve the economy of the people of Tuban, and how the influence on society will be the policy applied during the leadership of regent Heany Relawati Rini Widyastuti. In this study, the data obtained directly from the community as well as direct research in government institutions. Adapun data obtained is the primary data and secondary data. The data obtained directly from the archives agency, and BAPPEDA Tuban district. In this study can be concluded that in running the leadership, must have a good government system or commonly called Good Governance . In improving the economic district of Tuban influenced by the policies implemented by the local government. The policies applied in each field have different policies and developments. In the institutionalization of local government always involve the community directly. Society also has a big role in the realization of policies implemented by the local government. The economic growth of the people of Tuban district can be seen directly in the figure of Gross Regional Domestic Product. The economic growth of the people of Tuban always has a good increase.

Keywords : Tuban, Economi, Policy

PEDAHULUAN

Kebijakan merupakan salah satu upaya yang harus di terapkan oleh pemerintah setempat sebagai penunjang kinerjanya serta memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat . Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan

perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam perspektif pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat, membangun sistem pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat, yang mana dalam hal ini kesejahteraan masyarakat juga akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peran dari pemerintah daerah merupakan salah satu aspek utama yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat terlebih dalam sektor pekerjaan.

Kebijakan merupakan salah satu upaya yang harus di terapkan oleh pemerintah setempat sebagai penunjang kinerjanya serta memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat. Begitu juga yang di terapkan oleh Bupati Kabupaten Tuban yaitu Henay Relawati Rini Widyastuti. Henay Relawati Rini Widyastuti menerapkan beberapa kebijakan yang tunjukan untuk masyarakat Kabupaten Tuban sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Tuban. Keberhasilan pembangunan daerah ataupun peningkatan perekonomian masyarakat sangat di tentukan oleh kemampuan aparat pemerintah dalam menentukan pogram-pogram ataupun kebiakan yang akan di terapkan. Kebijakan yang di buat kemudian akan di laksanakan oleh aparat pemerintah serta masyarakat setempat yang sebelumnya telah di diputuskan oleh pihak aparat pemerintah, keberhasilan dari kebijakan yang di terapkan juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang mendukung agar masyarakat hidup dengan sejahtera.

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada beberapa kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya kondisi-kondisi ekonomi,teknologis,geografis,atau biologis pada aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat¹

Menurut Agus Salim,pembangunan merupakan suatu proses perencanaan yang di lakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memunculkan perubahan sosial pada masyarakat sehingga dapat mendatangkan peningkatan

kesejahteraan bagi masyarakat. Di sisi lain,menurut Agus Salim,perubahan yang terjadi di dalam masyarakat mencakup tiga struktur. Perubahan tersebut diawali dengan perubahan pada struktur ekonomi,kemudian di ikuti dengan perubahan pada struktur sosial dan yang terakhir perubahan dalam struktur kultural atau struktur ideologi.²

Kebijakan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Tuban dalam meningkatkan perekonomian harus di dukung juga oleh masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang selama ini telah di terapkan oleh pemerintah daerah. Bupati Tuban Henay Relawati Rini Widyastuti menekankan pentingnya pembentukan aparatur pemerintahan yang bersih, dengan aparat profesional. Sebagaimana yang di ketahui bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi dalam kemajuan perekonomian,yaitu fungsi distribusi,fungsi alokasi fungsi dan fungsi stabilitas. Fungsi alokasi yaitu pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik,seperti pembangunan jalan raya,jembatan,penyediaan fasilitas penerangan dan telepon. Fungsi distribusi yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan ³masyarakat. Sedangkan fungsi stabilitas yaitu pemerintah menciptakan stabilitas ekonomi,sosial politik,hukum serta pertahanan dan keamanan .

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan perekonomian yang begitu luas dan sangat kompleks tidaklah mungkin dapat dilaksanakan secara sentralistik oleh pemerintah pusat, hal ini diperlukan dukungan dari daerah-daerah yang ada di propinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan semangat untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance, maka paradigma pelayananpun mengalami pergeseran dari paradigma “sentralistik” menuju paradigma “desentralisasi”. Perubahan paradigma pemerintahan merupakan bentuk upaya agar pemerintahan menjadi yang lebih baik lagi terutama dalam melayani masyarakat. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik kini telah berubah menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi dan memiliki semangat entrepreneur.Perubahan orientasi pelayanan tersebut merupakan wujud perbaikan kualitas pelayanan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tuban.⁴

Pertumbuhan ekonomi dari kurun waktu lima tahun di kabupaten Tuban memiliki peningkatan yang cukup baik. Perekonomian kabupaten Tuban pada tahun 2010 menunjukan pertumbuhan yang lebih baik di bandingkan dengan ketahun-tahun sebelumnya,karena pemerintah lebih menekankan kebijakan yang mengedepankan pada perekonomian masyarakat. Seperti kebijakan yang di

¹ Soerjono Sorkanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta.CV Rajawali.Hal 338

²Agus Salim.2002. Sosiologi Suatu Pengantar:Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia. Yogyakarta. Tiara Wacana. Hal 263

³ <http://typotricen.blogspot.co.id/2016/01/fungsi-pemerintah-dalam-perekonomian.html>. di akses tanggal 18 Januari 2018,jam 20.20 WIB

⁴Khusnul Chotimah. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi Data Dan Tata Kerja Lembaga Lain Dalam Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Tuban. Dalam Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol 2. No 2. E-ISSN:2460-1586

lakukan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian yaitu pemerintah daerah selalu memperhatikan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil ataupun usaha sedang. Usaha yang dilakukan pemerintah setempat dengan cara memberikan pinjaman dengan memberikan nilai bunga yang rendah. Tentunya tindakan ini dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat untuk lebih baik lagi dalam mengembangkan usahanya yang mampu untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

Sektor ekonomi yang memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian kabupaten Tuban adalah sektor industri pengolahan. Industri pengolahan ini memberikan sumbangan pada pembentukan PDRB sebesar 20,30 %. Sektor selanjutnya yang memberikan distribusi besar dalam peningkatan perekonomian kabupaten Tuban adalah sektor pertanian yang sebesar 24,65%, sedangkan dari sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan peranan sebesar 17,90% terhadap perkembangan perekonomian kabupaten Tuban. Pertumbuhan perekonomian di kabupaten Tuban tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Heany Relawati Rini Widyastuti yang pada saat itu menjabat sebagai bupati kabupaten Tuban selama dua periode. Selama kepemimpinannya, Tuban selalu mengalami perkembangan yang baik. Pada tahun 2008 Tuban mendapatkan penghargaan langsung yang diberikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada saat itu menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini langsung diberikan kepada bupati Tuban Heany Relawati Rini Widyastuti secara langsung sebagai penghargaan even tingkat nasional.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan ekonomi Bupati Heany Relawati Rini Widyastuti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Tuban?
2. Bagaimana dampak kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Bupati Heany Relawati Rini Widyastuti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Tuban?

B. Tujuan

1. Untuk menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi Bupati Heany Relawati Rini Widyastuti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Tuban
2. Untuk menganalisis kebijakan ekonomi Bupati Heany Relawati Rini Widyastuti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Tuban

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama pengumpulan sumber primer dan sekunder. Sumber penelitian ini didapatkan dari Kearsipan kabupaten Tuban, Bappeda kabupaten Tuban, perpustakaan daerah kabupaten Tuban, perpustakaan Surabaya, perpustakaan Unesa, perpustakaan Medayu Agung, dan Rumah Sejarah Unesa. Tahap kedua yaitu kritik sumber (melakukan verifikasi dan pengujian terhadap sumber). Tahap ketiga adalah interpretasi yaitu penafsiran terhadap sumber yang telah diperoleh. Tahap keempat adalah historiografi yaitu

penulisan hasil penelitian sejarah secara kronologis dan analisis sesuai dengan tema.

Sumber data yang diperoleh dari peneliti seperti data primer yaitu pengambilan data langsung di lapangan. Data-data yang diperoleh juga didapatkan dari badan kearsipan kabupaten Tuban yang masih menyimpan data lengkap mengenai kepemimpinan Bupati Tuban Heany Relawati Rini Widyastuti. Data primer ini didapatkan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara masyarakat di beberapa daerah kabupaten Tuban. Selain data primer, peneliti juga mendapatkan data sekunder. Data sekunder ini didapatkan oleh peneliti baik dalam bentuk buku, majalah ataupun jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari setiap kebijakan yang diterapkan oleh seorang pemimpin terdapat beberapa faktor penting yang akan mempengaruhi kinerja dan kepemimpinannya. Faktor yang pertama yaitu faktor alokasi, distribusi, dan stabilitas. Faktor yang kedua yaitu orientasi politik, karena kejelasan dari orientasi politik yang akan diterapkan maka akan memperjelas dan memperkuat sistem pemerintahan yang dijalankan. Karena dengan orientasi politik yang terbuka maka rakyat akan lebih mengerti dan paham mengenai kepemimpinan yang akan dijalankan dan rakyat akan mendukung semua program yang akan dijalankan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Seperti halnya dalam bidang ekonomi, maka Bupati kabupaten Tuban juga memiliki orientasi ekonomi yang akan diterapkan dan yang akan dijalankan untuk meningkatkan masyarakat kabupaten Tuban.

Seperti halnya Visi dan Misi yang diangkat oleh Bupati Tuban Heany Relawati Rini Widyastuti. Yaitu Visi yang akan diterapkan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tuban Yang Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin. Dalam Visi yang diterapkan oleh Bupati Tuban jelaslah adanya keinginan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Tuban. Yang dimaksud "Mandiri" oleh Bupati Tuban yaitu keadaan masyarakat yang memiliki keberdayaan mampu menentukan pilihannya sesuai keinginannya, termasuk di dalamnya kemampuan dalam berpartisipasi (bukan mobilisasi) dalam berbagai aktivitas pembangunan. Sedangkan "sejahtera lahir batin" keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan minimalnya meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, serta kebebasan dalam melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dalam situasi lingkungan yang aman dan damai.

Aparat pemerintah memiliki peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian sebuah daerah.

Dalam perkembangan perekonomiannya, pemerintah Tuban memberikan sarana dan prasarana yang menunjang untuk perbaikan perekonomian. Di wilayah pedesaan, sarana dan prasarana selalu diperbaiki. Seperti perbaikan jalan-jalan di wilayah pedesaan, perbaikan jalan di persawahan, pembangunan pasar sebagai salah satu tindakan hubungan timbal balik antara pembeli dan penjual. Pembangunan pasar selalu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten Tuban, karena di pasar inilah kegiatan perekonomian masyarakat

berlangsung. Beberapa distributor barang-barang akan terlihat. Baik dari hasil pertanian, perkebunan ataupun hasil kerajinan. Sedangkan perbaikan jalan di pingir-pinggir persawahan di anggap sebagai upaya untuk mempermudah para petani dan pekebun untuk menjalankan kegiatannya selama menanam berbagai jenis tanaman yang ada di sawah.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, melalui APBD kabupaten Tuban telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di pedesaan ataupun di kelurahan. Program ini biasa di kenal PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat). Program yang di buat oleh pemerintah kabupaten tuban merupakan salah satu kebijakan yang di terapkan oleh Bupati Tuban Heany Relawati Rini Widyastuti sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sebagai pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang ada di seluruh wilayah kabupaten Tuban. Program Pemberdayaan Masyarakat ini sudah di laksanakan di Tuban sejak tahun 2001, dan merupakan satu-satunya kabupaten yang menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan menggunakan dana APBD murni. Lingkup kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat desa atau kelurahan meliputi

a) Bantuan Operasional Pemerintah Desa/Kelurahan

Kegiatan ini merupakan bantuan langsung yang di berikan di desa-desa dan kelurahan sebagai cara untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan. Misalnya untuk menunjang kegiatan seperti menunjang kegiatan administrasi desa, penyusunan jangka menengah untuk pembangunan desa ataupun kelurahan, dan kegiatan lainnya

b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan

Bantuan ini merupakan bantuan langsung dari pemerintah daerah untuk kegiatan penunjang pembedayaan masyarakat desa atau kelurahan, dengan fokus pembangunan fisik prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Misal kegiatannya: untuk pembangunan sarana dan prasarana (pembangunan jalan, irigrasi, pembuatan selokan, jembatan, gorong-gorong, pembanguan pasar desa atau kelurahan, selain itu dana yang di berikan juga dapat di gunakan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang mengarah pada peran peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis pada industri kecil, perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang sesuai dengan kondisi potensi yang ada di suatu daerah.⁵

Kondisi potensi antara di lingkup perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten Tuban memiliki perbedaan yang cukup jelas. Di wilayah pedesaan potensi yang menonjol merupakan potensi dari segi pertanian, perkebunan, dan perindustrian kecil, penggalan, ataupun pertambangan. Di wilayah

pedesaan di kabupaten Tuban lebih identik dengan lingkungan yang agraris. Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani ataupun pedagang. Hasil pertanian yang ada di kabupaten Tuban kemudian di salurkan di wilayah perkotaan kabupaten Tuban, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi keperluan masyarakat setempat. Selain hasil pertanian, di wilayah pedesaan juga sering kali menghasilkan hasil olah-olahan dari hasil panen. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia bersaha untuk di kembangkan. Dengan adanya hasil olah hasil pertanian, di harapkan akan mengurangi pengangguran di suatu daerah.

Pertumbuhan perekonomian kabupaten Tuban yang di hitung data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, perkembangan perekonomian di kabupaten Tuban setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup positif. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang di hitung menggunakan PDRB merupakan rata-rata pertumbuhan setiap sektor.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tuban yang di ukur menggunakan PDRB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tahun 2006-2010. Pada tahun 2006, terjadi kenaikan harga BBM juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,81%, pada tahun 2007 kenaikan harga BBM masih di rasakan oleh kalangan usaha, dan hal ini juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,49 %. Pertumbuhan laju perekonomiannya semakin stabil pada tahun 2008 di mana mencapai 6,72. Sedangkan pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami keterlambatan sebesar 5,99 % hal ini di karenakan dampak dari krisis global mempengaruhi tingkat ekspor dan juga berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun akibat krisis global. Pada tahun 2010, kondisi ekonomi kabupaten Tuban kembali stabil, yaitu mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 6,22 %.

Sektor pertanian memiliki peningkatan perekonomian sebesar 1,85 pada tahun 2008, peningkatan ini beragur dengan baik, dan memiliki kestabilan yang bagus, sampai pada tahun 2010 kenaikan ini mencapai 2,47%. Kenaikan sektor pertanian ini di pengaruhi oleh pergantian musim, yang memiliki curah hujan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya curah hujan sangat membantu petani dalam hal pengairan, dan menghemat pengeluaran untuk melakukan irigrasi. Bahkan pada tahun 2008 petani di wilayah Tuban mampu panen 2x dalam setahun, begitu jugapada tahun 2010 yang mana curah hujan yang intensitasnya tinggi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus di lakukan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi pemerintah di perlukanya dukungan dari sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain agar mampu memenuhi keinginan dan menjawab tuntutan global. Analisa terhadap lingkungan baik secara internal maupun eksternal merupakan salah satu cara yang harus di tempuh sebagai cara untuk mengetahui kekuatan,

⁵Pemerintah Kabupaten Tuban. 2010. *Selayang Pandang Pembangunan Kabupaten Tuban*. Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban. Hal 13. Edisi November

kelemahan, peluang, ataupun tantangan yang kelak akan di hadapi oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, bahwa strategi yang akan di terapkan oleh pemerintah daerah sebagai upaya pencapaian tujuan harus mencakup adanya visi, misi, ataupun tujuan.

Kabupaten Tuban setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik. Tenyunya kenaikan pertumbuhan sektor perekonomian di kabupaten Tuban tidak lepas dari keijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah ketika kepemimpinan Heany Relawati Rini Widyastuti dalam memajukan pertumbuhan perekonomian di kabupaten Tuban. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan pada masa kepemimpinan Bupati Heany Relawati Rini Widyastuti

Kebijakan yang di terapkan oleh Bupati Tuban Heany Relawati Rini Widyastuti setiap bidang memiliki kebijakan yang berbeda-beda, serta pogram pembangunan yang berbeda pula. Kebijakan di setiap bidangnya di bedakan agar tujuan yang akan di capai lebih fokus lagi. Adanya pogram pembangunan yang di jalankan oleh pemerintah daerah memiliki tujuan agar memiliki arah yang lebih lanjut lagi, dan sebagai salah satu upaya pendukung dari kebijakan yang di jalankan menjadi lebih terarah dan berhasil. Misal kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah dari bidang Koperasi dan Usaha Kecil menengah. Kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah seperti Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, di adakanya pengembangan usaha mikro kecil, serta di adakanya pembinaan dan pengembangan koperasi.

Sebagai pendukung dari kebijakan yang telah di terapkan, maka di jalankanya pogram pembangunan dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Pogram yang di maksud seperti pogram pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pogram pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah. Pogram pembangunan ini memudikan adanya kegiatan pokok seperti adanya sosialisasi informasi mengenai permodalan, di adakanya promosi produk dari hasil produk usaha kecil menengah. Kegiatan ini bertujuan agar arah kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan lebih terarah. Kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten Tuban. pogram yang kedua adalah kebijakan di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam sektor perdagangan dan perindustrian kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah seperti pengembangan atau revitalisasi pasar daerah serta pengembangan jaringan usaha dan informasi perdagangan melalui kementerian dan peningkatan perdagangan dalam negeri maupun ekspor, pengembangan kewirausahaan yang kompetitif serta kemitraan bagi uaha mikro menengah melalui promosi produk usaha dan bantuan permodalan.⁶

Dalam pogram kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah akan di adakan pogram pembangunan yang *pertama* pogram peningkatan efisiensi perdagangan. Pogram kegiatan ini seperti di adakanya sentral industri

kecil, bantuan modal industri kecil, diadakanya pameran untuk potensi dan produk unggulan daerah. Pogram ini di lakukan agar masyarakat memiliki pengembangan yang lebih baik lagi dalam perindustrian yang selama ini mereka jalankan. Dan pameran yang di adakan oleh pemerintah daerah agar seluruh masyarakat mampu mengembangkan lagi perindustrian yang di jalankan dan diketahui oleh masyarakat umum.

Kedua, pogram pengemangan usaha dan lembaga perdagangan. Pogram yang di jalankan seperti bantuan pengembangan pasar desa. Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman antara pedagang dan pembeli. Pembangunan pasar di daerah-daerah wilayah kabupaten Tuban selalu diperbaiki, karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selain itu pasar juga sebagai salah satu tempat di jualnya hasil panen dari para petani setempat. Kebersihan dari pasar juga akan mempengaruhi dari jumlah pembeli dan pedagang. Semakin bersih dan nyaman dari pasar maka semakin baik pula transaksi yang akan berlangsung. Berbagai jenis sayur, buah-buahan, serta berbagai macam kerajinan di jual di pasar. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah daerah selalu memperhatikan bagaimana perkembangan pasar di setiap daerah.

Pogram selanjutnya di bidang Kelautan dan Perikanan. Wilayah kabupaten Tuban bagian Utara berbatasan langsung dengan laut. Jadi banyak sekalimasyarakat di pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan. Mereka menggantungkan hidupnya sehari-hari dengan mencari ikan di laut dan mengolahnya menjadi olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi lagi. Untuk mensiasati permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat setempat, maka pemerintah daerah menjalankan beberapa kebijakan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Arah kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah peningkatan hasil-hasil produksi perikanan dan kelautan melalui pengembangan budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, dan yang terakhir adalah pengembangan sarana dan prasarana dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Seperti pada kebijakan-kebijakan yang telah di terapkan, tentunya akan ada pogram pembangunan sebagai bentuk dukungan dari kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah. Pogram pembangunan yang akan di jalankan oleh pemerintah daerah dalam bidang kelautan dan perikanan adalah *pertama* pogram pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan dalam pogram pembangunan yang pertama ini adalah pemasangan dan pengan dan lampu penerangan di wilayah pesisir. Penerangan ini di lakukan tentunya sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang melakukan pelayaran pada malam hari agar tidak kegelapan. Karena dengan adanya pemasangan ini, masyarakat akan lebih mudah lagi untuk melakukan pelayaran tanpa adanya rasa khawatir. *Kedua*, pogram peningkatan kesadaran dan penegak hukum dan pendayagunaan sumber daya laut. Kegiatan yang akan di

⁶ Ibid. Hal II-56

jalankan oleh pemerintah pada program ini antara lain adanya pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan, pembinaan dan pengawasan sumber hayati perikanan dan kelautan, pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan-bahan kimia dan obat-obatan dalam bidang perikanan.

Pada program ini pemerintah daerah memberikan arahan kepada nelayan-nelayan di wilayah pesisir pantai kabupaten Tuban untuk tidak menggunakan obat-obatan kimia. Obat-obatan kimia di pandang sebagai salah satu faktor rusaknya terumbu karang, dan mampu mematikan beberapa jenis-jenis ikan yang ada di laut. Karena hal ini juga akan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan nantinya. Ketika nelayan-nelayan menggunakan obat-obatan kimia sebagai salah satu cara untuk menangkap ikan, maka populasi ikan akan berkurang. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh terhadap pendapat tingkat perekonomian masyarakat setempat. Dengan hal ini pemerintah daerah menghimbau agar nelayan tidak menggunakan obat kimia untuk menangkap ikan, dan di anjurkan dengan cara yang tradisional saja. *Ketiga*, program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat. Pada program ketiga ini pemerintah daerah menjalankan kegiatan seperti pengendalian mantra bahari dan gerakan bersih pantai dan laut di kabupaten Tuban.

Gerakan bersih pantai dan laut ini sering di lakukan oleh masyarakat umum untuk menjaga kebersihan dan keindahan laut ataupun pantai di sekitar pesisir. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat sadar bahwa menjaga lingkungan merupakan aspek yang penting. Selain laut dan pantai menjadi indah, juga berpengaruh terhadap kualitas ikan-ikan nantinya. *Ke empat*, program pengembangan perikanan tagkap. Kegiatan yang di liris oleh pemerintah pada program ke empat ini antara lain pegemangan pangkalan pendaratan ikan (PPI), peningkatan sarana dan prasarana di pangkalan pendaratan ikan, pembangunan lanjutan fasilitas tambah labuh PPI Karangagung. Program yang di lansir oleh pemerintah ini tentunya sangat membantu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Karena nelayan akan terbantu dalam pemasaran ataupun tempat pengumpulan ikan-ikan yang mereka dapatkan. Tetapi dalam hal ini akan mempermudah para nelayan untuk melakukan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang karena setiap aspek kehidupan berhubungan dengan kesehatan. Kesehatan juga mendukung keberhasilan dalam pembangunan nasional. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, yaitu turut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang diawali dengan perilaku hidup sehat dari diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, selain didukung oleh masyarakat juga didukung dengan

adanya sumber daya kesehatan yang mencakup semua unsur atau komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat tersebut yaitu, segala bentuk dana, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, farmasi, alat kesehatan serta fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Untuk mendukung dan menjadikan masyarakat kabupaten Tuban memiliki kesehatan yang baik. Maka pemerintah daerah menerapkan beberapa kebijakan yang mengarah pada bidang kesehatan. Kebijakan yang *pertama* dalam bidang kesehatan adalah peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan. Dalam kebijakan yang pertama ini, pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pelayanan gratis di pukesmas setempat. Setiap lingkup daerah kabupaten Tuban, pemerintah daerah membangun pukesmas-pukesmas yang bisa di gunakan oleh masyarakat Tuban untuk memperoleh pelayanan yang baik. *Kedua* mewujudkan efisiensi pelayanan kesehatan, *ketiga* yaitu meningkatkan perilaku dan mewujudkan lingkungan yang sehat di masyarakat.

Lingkungan sehat dan bersih adalah salah satu faktor yang penting. Karena lingkungan yang bersih dan jauh dari kumuh adalah lingkungan yang mampu di jadikan indikasi bahwa masyarakat memahami secara baik untuk hidup sehat. *Ke empat* peningkatan sarana dan prasarana pukesmas atau pukesmas pembantu. Sarana dan prasarana di sebuah instansi kesehatan sangat perlu di perhatikan. Karena semakin baik prasarana yang di berikan, maka masyarakat akan semakin merasa bahwa pemerintah selama ini memperhatikan secara baik kehidupan rakyatnya. *kelima* menyediakan obat-obatan bagi masyarakat miskin. Pada kebijakan ke lima ini, tentunya akan membantu sekali bagi masyarakat yang memiliki perekonomian yang kurang baik.

Karena masyarakat yang memiliki perekonomian yang rendah akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya bantuan obat-obatan dari pemerintah daerah untuk masyarakat miskin di nilai sangat membantu. Selain kebijakan yang di terapkan bidang kesehatan, pemerintah daerah juga membuat program pembangunan di bidang kesehatan yang di gunakan sebagai salah satu cara untuk menunjang programnya agar berjalan dengan baik. Program pembangunan yang pertama yaitu rehabilitasi sedang dan berat untuk dinas, pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit, pembangunan garasi mobil ambulance. Selain itu adanya program penggandaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pukesmas dan jaringannya. Dalam program ini, pemerintah daerah menerapkan beberapa program yang akan di terapkan seperti adanya program penggandaan pusling (roda 4), rehabilitasi sedang dan rehabilitasi berat pukesmas di wilayah soko, dan pustu Pandanwangi, rehabilitasi sedang dan rehabilitasi berat pukesmas di wilayah soko, dan pustu Widang, rehabilitasi sedang dan rehabilitasi berat pukesmas di wilayah soko, dan pustu Tegalrejo, rehabilitasi sedang dan rehabilitasi berat pukesmas di wilayah soko, dan pustu Patihan, rehabilitasi sedang dan rehabilitasi berat pukesmas di wilayah soko, dan pustu Prambon Wetan.

Program selanjutnya di program penggandaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah

Sakit/RSJ/Rumah Sakit Paru-paru, Rumah Sakit Mata akan di adakan pogram pembangunan seperti pogram pengembangan ruang isolasi, penggandaan alat-alat kesehatan rumah sakit, pengadaan obat-obatan rumah sakit, penggandaan perlengkapan peralatan rumah sakit, penggandaan bahan-bahan logistik rumah sakit, pembangunan door loop/selaras rumah sakit, pembangunan parkir rumah sakit, serta penggandaan jaringan instalasi listrik

Kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah sangat membantu masyarakat Tuban. Masyarakat sangat merasakan dampak dari kepemimpinan bupati Tuban Heany Relawati Rini Widyastuti selama menjabat sebagai bupati Tuban. Pembangunan yang selama ini di janjikan di jelankan oleh pemerintah daerah dengan baik. Di wilayah desa-desa ataupun perkotaan pembangunan jalan terlihat jelas. Kondisi jalan yang rusak di perbaiki oleh pemerintah daerah dengan cepat. Selain itu bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi rendah, pemerintah daerah selalu mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kebijakan merupakan salah satu cara yang di gunakan oleh pemerintah daerah untuk merujuk pada pogram-pogram yang akan di jalankan sebagai salah satu pogres terciptanya kinerja yang baik. Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan dan pogram pembangunan yang berbeda-beda. seperti yang di terapkan oelh bupati Tuban Heany Relawati Rini Widyastuti. Sebagai seorang bupati, Heany Relawati Rini Widyastuti menerapkan beberapa kebijakan, seperti kebijakan di bidang pertanian, kesehatan, perindustrian dan penggalia, kesehatan, kepariwisataan, dan pogram lainnya.

Kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten Tuban. Kondisi perekonomian masyarakat kabupaten Tuban di itung dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban setiap tahunnya mengalami kenaikan yang baik. Pada tahun 2006-2010 kondisi perekonomian Tuban menunjukan angka yang baik. Semakin baik kondisi ekonomi suatu daerah, maka dapat di jadikan sebaagai salah satu infdikator kemajuan dari daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandi. 1992. *Batik Gedhog Tuban*. Surabaya. Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik, Bappeda Kabupaten Tuban. 2009. *Produk Domestik Regional Bruto*. Tuban: Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Tuban. Edisi November
- Gaffar Afan. 1983. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. C.V Rajawali
- Gie Kwik Kian. 1995. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII.
- Kasdi Aminudin. 2005. *Memahami Sejarah*. Sejarah. Unesa University Press
- Pemerintah Kabupaten Tuban. 2008. *Pemerintah Kabupaten Tuban “ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2008”*. Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban.
- Pemerintah Kabupaten Tuban. 2009. *Pemerintah Kabupaten Tuban “ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009*. Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban
- Pemerintah Kabupaten Tuban. 2009. *Selayang Pandang: Pembangunan Di Kabupaten Tuban*. Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban
- Pemerintah Kabupaten Tuban. 2010. *Selayang Pandang: Pembangunan Di Kabupaten Tuban*. Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban
- Pemerintah Kabupaten Tuban. 2010. *Selayang Pandang Pembangunan Di Kabupaten Tuban*. Tuban: Pemerintah Kabupaten Tuban. Edisi November.
- Pemerintah Kabupaten Tuban. 2015. *Tuban Bumi Wali. Tuban*. Pemerintah Kabupaten Tuban. Cetakan ke-2
- Salim Agus. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya
- Soekanto Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. C.V Rajawali
- Thoha Mifta. 2007. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Undang-undang Pertauran Daerah yaitu keputusan Bupati No 188.45/167/KPTS/414.012/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang *Penerimaan Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Kegiatan Pembinaan dan Pembedayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomis Tahun 2010*. Tuban. 2010
- Jurnal**
- Chotimah Khunul. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi Data Dan Tata Kerja Lembaga Lain Dalam Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Tuban*. Dalam Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol 2. No 2. E-ISSN:2460-1586
- Hartono Samuel. 2005. *Alun-alun dan Revitalisasi Indentitas Kota Tuban*. Dalam Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur. Vol 33, No 1
- Khusnul Chotimah. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi Data Dan Tata Kerja Lembaga Lain Dalam Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Tuban*. Dalam Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol 2. No 2. E-ISSN:2460-1586
- Retnandari Nunuk Dwi. 2015. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustka Pelajar. Cetakan ke-2. ISBN: 978-602-229-379-8

Suryono Agus. 2014. Keijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol 1 No 2

Internet

<http://typotricen.blogspot.co.id/2016/01/fungsi-pemerintah-dalam-perekonomian.html>. di akses tanggal 18 Januari 2018, jam 20.20 WIB

https://carapedia.com/pengertian_definisi_tujuan_info2100.html. Di akses pada tanggal 16 April 2018

<http://typotricen.blogspot.co.id/2016/01/fungsi-pemerintah-dalam-perekonomian.html>. di akses tanggal 19 Januari 2018, jam 21.20 WIB

